

SUMMARY

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Created by Asmiyati Fitriah

Subject : PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Subject Alt : PERLINDUNGAN HUKUM

Keyword : pasal 19; perlindungan hukum; undang-undang no 5;

Description :

Guna mewujudkan catur tertib pertanahan dan menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak-hak atas tanah di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan kepada pemerintah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kewajiban Pemerintah ini diikuti pula dengan kewajiban pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran, guna memperoleh kepastian tentang hak atas tanah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan untuk mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh BPN. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendaftaran Tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah karena masyarakat akan memiliki bukti kepemilikan tanah yang berupa sertipikat tanah yang sah dalam hokum pertanahan. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah ketidaklengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon untuk penerbitan sertipikat tanah, masyarakat belum mempersiapkan dana untuk biaya pelayanan survei nilai bidang tanah dan pengukuran, adanya perselisihan karena tidak ada kesepakatan tentang batas tanah, dan kurangnya tenaga teknis operasional. Kata kunci : pendaftaran tanah, kepastian, perlindungan hukum.

Date Create : 23/05/2014

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-2008-41-089

Collection : 2008-41-089

Source : Perpustakaan Esa Unggul

Relation Collection Universitas Esa Unggul

COverage : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : copyright @2014 by UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor